

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN, DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
PROVINSI PAPUA TAHUN 2014-2019**

*ANALYZE THE IMPACT OF ECONOMIC GROWTH, INEQUALITY IN
INCOME DISTRIBUTION, AND THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX ON
POVERTY LEVELS IN PAPUA PERIOD 2014-2019*

¹⁾Ikke Indrawati, ²⁾Sudati Nur Sarfiah, ³⁾Rian Destiningsih
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
ikkeindrawatii@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan menjadi masalah utama di Kawasan Timur Indonesia. Provinsi Papua merupakan daerah yang tingkat kemiskinan paling tinggi dari 34 provinsi lain di Indonesia. Kondisi kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua pada rentang waktu 2014-2019, dimana Kabupaten Deiyai menjadi Kabupaten dengan tingkat kemiskinan paling tinggi mencapai 44,35% disusul oleh Kabupaten Intan Jaya sebesar 41,63%. Dalam penelitian ini membahas faktor- faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Papua yang meliputi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel independen dalam kurun waktu 2014-2019. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model fixed effect dengan jumlah data cross section sebanyak 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan data time series sebanyak 6 tahun. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, ada pengaruh positif dan tidak signifikan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat kemiskinan, ada pengaruh negatif dan signifikan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan, dan ada pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan IPM secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua selama tahun 2014 sampai 2019.

Kata kunci : Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, IPM, panel

Abstract

Poverty is a major problem in Eastern Indonesia. Papua Province is an area with the highest poverty rate of 34 other provinces in Indonesia. Poverty conditions in regencies and cities in Papua Province in the 2014-2019 period, where Deiyai Regency became the district with the highest poverty rate reaching 44.35%, followed by Intan Jaya Regency at 41.63%. In this study, it discusses the factors that influence poverty in Papua Province which include economic growth, inequality in income distribution, and the human development index as independent variables in the 2014-2019 period. This study uses panel data regression analysis with a fixed effect model with a total cross section of 29 districts / cities in Papua Province and 6 years of time series data. The results of the study indicate that there is a positive and significant effect of economic growth on the poverty level, there is a positive and insignificant effect of inequality in income distribution on the poverty level, there is a negative and significant effect of the Human Development Index (HDI) on poverty levels, and there is an effect of economic growth, inequality of income distribution, and HDI together against the poverty level in Papua Province during 2014 to 2019.

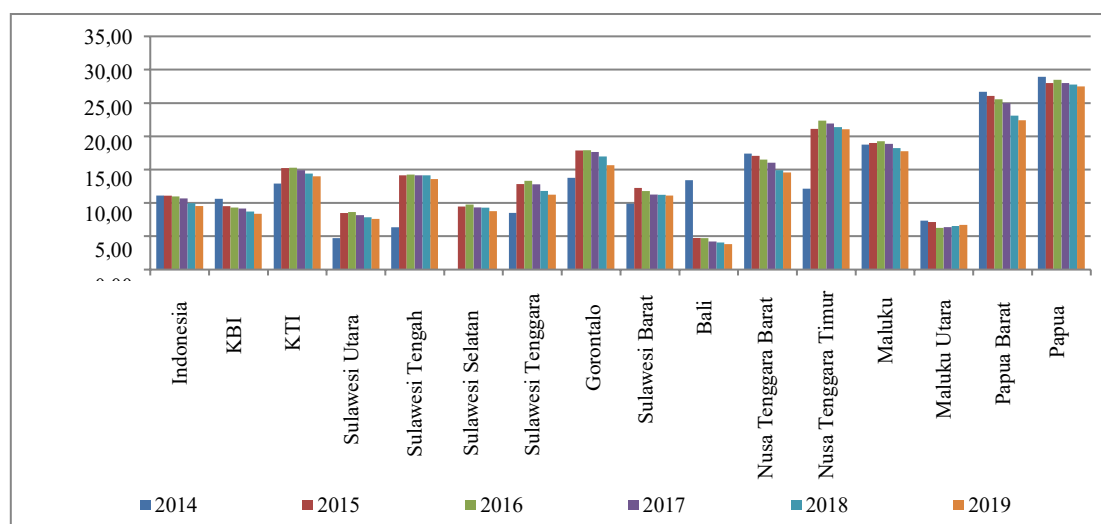
Keywords: Poverty, economic growth, inequality, HDI, panel.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dapat terwujud dengan mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan (Kuncoro, 2010:3). Dalam strategi pembangunan nasional terdapat 3 dimensi pembangunan salah satunya dimensi pemerataan pembangunan untuk memperkecil ketimpangan pendapatan antarkelompok atau antarwilayah dengan prioritas wilayah desa untuk mengurangi kemiskinan, wilayah pinggiran, Luar Jawa dan Wilayah Timur (RPJMN 2015-2019). Menurut Arsyad (2010:299) kemiskinan merupakan masalah multidimensional, yang berarti bahwa kemiskinan memiliki berbagai aspek seiring kebutuhan manusia yang semakin beragam. Secara umum dapat dilihat bahwa kemiskinan menjadi dua macam, yang pertama primer yaitu aspek yang meliputi miskin harta / aset, miskin organisasi baik sosial maupun politik, dan miskin pengetahuan. Kedua, yaitu sekunder merupakan aspek yang memandang bahwa kemiskinan dapat

dilihat dari kurangnya hubungan sosial, informasi, dan sumber keuangan.

Kawasan Timur Indonesia (KTI) meliputi lima provinsi yaitu Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Papua merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Kepulauan Bangka dan Riau. Pada tahun 2014-2019 rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10,56%, pada KBI sebesar 9,28%, sedangkan pada KTI sebesar 14,46%. Dari 13 Provinsi yang termasuk dalam KTI, Papua menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi dibanding provinsi lainnya. Pada tahun 2014-2019 rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Papua mencapai 28,10% yang mengartikan bahwa penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan yakni pada tahun 2019 sebanyak 926,36 ribu jiwa.



Sumber: BPS, 2019.

Gambar 1 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Indonesia, KBI, KTI, dan 13 Provinsi Kawasan Indonesia Timur Tahun 2014-2019

Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonominya. Dimana semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pendapatan di suatu wilayah akan meningkat dan akan meningkatkan pendapatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kata lain pertumbuhan ekonomi memberi efek cucuran ke bawah atau trickle down effect pada perekonomian suatu wilayah. Namun pada penelitian Anzwar (2016:10) bahwa sebagian besar negara sedang berkembang termasuk Indonesia, baik di tingkat nasional ataupun regional, hanya terdapat suatu golongan masyarakat tertentu saja yang menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan adanya manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak bersifat inklusif yang kemudian akan mengakibatkan memburuknya kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada tingkat daerah menunjukkan kesenjangan. Dimana Kabupaten Mimika memiliki pertumbuhan yang terlalu besar dibanding kabupaten dan kota lain. Hal ini dikarenakan daerah tersebut memiliki keunggulan pada sektor pertambangan dengan adanya PT Freeport, sehingga Kabupaten Mimika memiliki pendapatan daerah yang sangat

tinggi. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sebagian besar ditopang oleh pendapatan sektor pertambangan yaitu pada 2019 sebesar 23,62% diikuti sektor konstruksi 16,11% dan sektor pertanian sebesar 12,75%. Selanjutnya, dimasing-masing kab/kota di Papua pada tahun 2014-2019 pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Diketahui bahwa, di Kabupaten Mimika pada tahun 2014 mengalami kenaikan tertinggi dibandingkan kab/kota lainnya yaitu sebesar 44,55% serta penurunan terendah juga terdapat di Kabupaten Mimika, hal ini tidak terlepas dari pendapatan PDRB Kabupaten Mimika yang sebagian besar di topang oleh sektor pertambangan.

Hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan dalam suatu rumah tangga disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang diterima. Memburuknya kemiskinan terjadi akibat jumlah kemiskinan yang banyak dimana jumlah anggota keluarga miskin akan semakin meningkat (Todaro dalam Nisa, 2020:57). Menurut Sugiyarto (2015:116), hubungan ketimpangan dan kemiskinan adalah hubungan pragmatis, yakni kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan atau kemiskinan terbentuk dari ketimpangan. Ketimpangan di suatu daerah akan

memunculkan suatu masalah seperti peningkatan migrasi, tindakan kriminal dan konflik antar penduduk (Fahrizal, 2019:400). Pada tahun 2019 Provinsi Papua menjadi provinsi ketimpangan distribusi pendapatan keempat tertinggi se Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat dengan nilai ketimpangan sebesar 0.396%. Maka Provinsi Papua berada pada kondisi ketimpangan distribusi pendapatan sedang. Lalu, pada kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di masing-masing daerah administratif baik kabupaten atau kota, memiliki nilai berbeda-beda. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi ketidakmerataan pada pendistribusian pendapatan penduduk pada masing-masing daerah. Kabupaten Sarmi dengan ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi sebesar 0,44% dan Kabupaten Puncak dengan ketimpangan distribusi pendapatan terendah sebesar 0,17%.

Menurut Kuncoro dalam Agustina (2018: 269) terdapat tiga penyebab terjadinya kemiskinan. Pertama, kemiskinan terjadi akibat adanya ketidaksamaan pemilik sumber daya sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Kemudian, disebabkan oleh kualitas SDM yang rendah sehingga produktivitasnya rendah yang akan menurunkan tingkat upah. Selanjutnya, diakibatkan oleh banyaknya modal yang dimiliki. Dimana, tiga faktor kemiskinan itu dapat dijelaskan dengan teori lingkaran

setan (*Vicious Cycle*). Kualitas penduduk atau sumberdaya yang baik dapat mempengaruhi jalannya roda perekonomian. Kualitas sumberdaya manusia secara umum diukur dengan indek pembangunan manusia (IPM). Besar kecilnya produktivitas penduduk digambarkan oleh tinggi rendahnya IPM. Semakin tinggi IPM akan mendorong peningkatan produktivitas penduduk dan akan mempengaruhi peningkatan terhadap tingkat pendapatan penduduk. Sebaliknya, jika IPM rendah maka dapat mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk yang cenderung menurun. Hal tersebut dikarenakan tinggi rendahnya IPM dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang menentukan produktivitas dan mendorong tingkat pendapatan. Provinsi Papua menjadi provinsi dengan IPM paling rendah se Indonesia, namun dalam rentang waktu 2018-2019 Provinsi Papua dapat meningkat pada taraf sedang. Pada tahun 2017 IPM Provinsi Papua berada pada taraf rendah sebesar 59,09 yang mengartikan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Papua masih rendah. Namun pada tahun 2018 sebesar 60,06, dan tahun 2019 sebesar 60,84 IPM Provinsi Papua sudah berada taraf pada pembangunan manusia sedang. Hal tersebut tidak terlepas dari perbaikan bidang pendidikan dan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Deskriptif kuantitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat empat variabel dalam penelitian yaitu variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen (Y), variabel pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel independen (X). Pengolahan data

menggunakan analisis regresi data panel yang

merupakan model analisis yang menggabungkan data silang waktu (*time series*) dan silang tempat (*cross section*).

HASIL PEMBAHASAN

Uji Model Terbaik (Penyesuaian Model)

1. Uji Chow

Tabel 1. Hasil dan Analisis Uji Chow

Effect Test	Statistics	Degree of freedom	Prob.
Cross section F	354.089000	(28,142)	0.0000
Cross section Chi-sqr	741.265511	28	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10, 2020

Hasil dari Uji Chow pada tabel 1 diatas didapat nilai probabilitas *cross section* F sebesar $0.000 < \text{nilai taraf}$

signifikans 0,05, maka model estimasi terbaik adalah *fixed effect*.

2. Uji Hausman

Tabel 2. Hasil dan Analisis Uji Hausman

Test Summarray	Chi Square Statistic	Chi Square Degree of freedom	Prob.
Cross section random test	37.297122	3	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 10, 2020

Hasil dari Uji Hausman pada tabel 2 diperoleh nilai probabilitas sebesar $0.0000 < \text{signifikansi } 0,05$. Sehingga model *fixed effect* terpilih sebagai permodelan terbaik dalam penelitian ini. Jika dalam pengujian

Chow dan Hausman telah dipilih model *fixed effect* sebagai permodelan terbaik, berarti pada pengujian selanjutnya yaitu Uji Langrange Multiplier (LM) tidak dilakukan.

Analisis Metode Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda dengan *Fixed Effect Model*.

Variable	Coefficient
C	34,94917
(X1)	0,025017
(X2)	0,284330
(X3)	-0,102161

Sumber: Pengolahan data dengan Eviews 10, 2020

Berdasarkan tabel 3, dapat dirumuskan persamaan seperti berikut:

$$Y = 34.94917 + 0.025017X1 +$$

$$0.284330X2 - 0.102161X3$$

Berdasarkan persamaan yang telah terbentuk sehingga dapat diinterpretasikan :

1. Nilai C sebesar 34,94917, artinya jika nilai pertumbuhan ekonomi (X1), ketimpangan distribusi pendapatan (X2), indeks pembangunan manusia (X3) nilainya 0 (nol), maka tingkat kemiskinan (Y) menaik sebesar 34.94917.
2. Koefisien pertumbuhan ekonomi(X1) sebesar 0,025017, artinya apabila ada peningkatan X 1 sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan pada (Y) sebesar 0.025017%, *ceteris paribus*.
3. Koefisien ketimpangan distibusi pendapatan(X2) sebesar 0,284330, artinya apabila ada peningkatan X2 sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan (Y) sebesar 0.284330%, *ceteris paribus*.
4. Koefisien indeks pembangun manusia(X3) sebesar -0,102161, artinya apabila ada peningkatan X3 sebanyak 1% akan akan menurunkan tingkat kemiskinn sebesar 0.102161%, *ceteris paribus*.

Uji Statistik

1. Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 4. Hasil Pengujian Koeffisien Determinnasi

R-sqrd	0,993940	Mean dependn v	29,48787
Adj R-sqrd	0,992617	S.D, dependn v	9,852629
S.E, of regresn	0,846601		
F-statistik	751,2617		
Prob (F statistik)	0,000000		

Sumber: Pengolahan data dengan Eviews 10, 2020

Nilai *Adjusted R sward* diatas, adalah standar eror pada model regresi 0.846601 < 0,992617 artinya variabel tingkat kemiskinan (Y) dijabarkan oleh variabel (X) sebanyak 99,2617. Sedangkan sisa sebesar 0,7383 dapat di jelaskan oleh variabel diluar model dalam penelitian ini. Sedangkan *S.E. of regression* yang menunjukkan nilai standar deviasi variabel yang ditunjukkan dengan *S.D. dependent variabl* sebesar 9.852629 yang dapat diartikan bahwa model regresi adalah valid sebagai model estimator.

2. Uji t (Uji Secara Parsial)

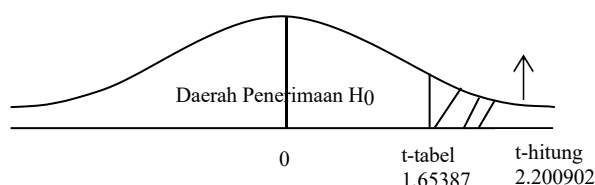
Tabel 5. Hasil Uji t (Pengujian Parsial)

Variable	t-Statistic	Prob.
C	12.32277	0.0000
X1	2.200902	0.0294
X2	0.193848	0.8466
X3	-2.015250	0.0458

Sumber: Pengolahan data dengan Eviews 10, 2020

1) Pertumbuhan Ekonomi (X1)

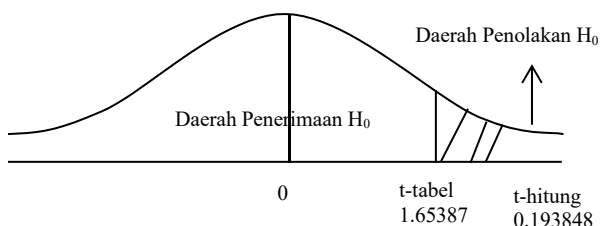
Berdasarkan hasil Uji t pada tabel 5, pertumbuhan ekonomi memiliki thitung 2,200902 dengan ttabel 1.65387, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ mengartikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, dan nilai signifikansi menunjukkan prob ^{Daerah Penolakan H_0} $0.0294 > 0.05$. Dengan demikian ada pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi(X1) terhadap tingkat kemiskinan(Y)



Gambar 2. Uji t Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

2) Ketimpangan Distribusi Pendapatan

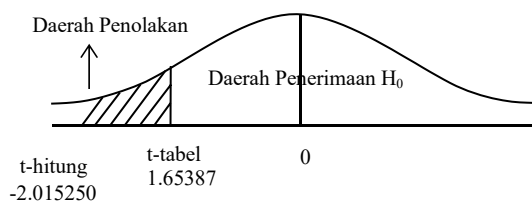
Berdasarkan hasil Uji t pada tabel 5, ketimpangan distribusi pendapatan memiliki thitung 0.193848 dengan ttabel 1.65387, maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ mengartikan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, dan nilai signifikansi menunjukkan probabilitas $0.8466 > 0.05$. Dengan demikian ada pengaruh positif dan tidak signifikan ketimpangan distribusi pendapatan(X2) terhadap tingkat kemiskinan(Y).



Gambar 3. Uji t Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan

3) Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil Uji t pada tabel 5, indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki thitung sebesar -2.015250 dengan ttabel 1.65387, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ mengartikan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, dan nilai signifikansi menunjukkan probabilitas $0,0458 < 0.05$. Dengan demikian ada pengaruh negatif dan signifikan IPM(X3) terhadap tingkat kemiskinan(Y).



Gambar 4. Uji t Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan

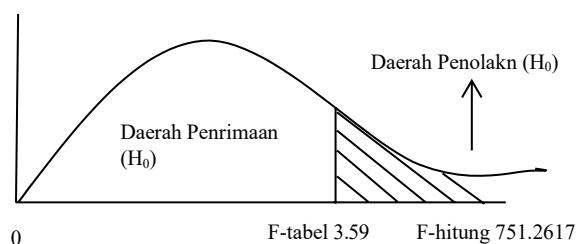
3. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji F

F-statistic	Prob (F-statistic)	Keterangan
751.2617	0.000000	Ada pengaruh

Sumber: Pengolahan Data dengan Eviews 10, 2020

Berdasarkan tabel 6 diperoleh Fhitung sebesar 751,2617 > Ftabel sebesar 3,59 dan nilai signifikans sebesar $0.000 < 0.05$. Maka, disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan variabel pertumbuhan ekonomi (X1), ketimpangan distribusi pendapatan (X2) dan IPM (X3) secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan (Y).



Gambar 5. Uji F Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia Secara Bersama-sama Terhadap Tingkat Kemiskinan

PEMBAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2014-2019

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2014-2019. Dimana setiap 1 % peningkatan pertumbuhan akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0.025017 jika variabel lain tetap.

Hal ini disebabkan karena menurut BPS Provinsi Papua 2014-2019 pertumbuhan ekonomi di Papua fluktuatif dan cenderung menurun. Adapun penurunan drastis terjadi pada tahun 2019 sebesar -15,72%, tidak terlepas dari penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika tahun 2019 sebesar -38,52% yang disebabkan karena penurunan pertumbuhan sektor pertambangan dimana dalam sektor ini PT Freeport menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar sedang mengalami penurunan produksi dikarenakan terdapat peralihan masa transisi penambangan dari

tambang terbuka Grasberg menuju tambang bawah tanah (BPS Provinsi Papua, 2019:80). Belum meratanya sektor penopang PDRB yang menunjang pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua dimana sebagian besar ditopang oleh pendapatan sektor pertambangan yaitu sebesar 23,62%. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua menunjukkan penurunan yakni sebesar 4,64%, begitu pula tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan yakni sebesar 27,62%. Selanjutnya tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua meningkat menjadi 7,37%, dan tingkat kemiskinan juga ikut meningkat 27,74%. Hal ini mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua memiliki hubungan searah terhadap tingkat kemiskinan.

Adapun hasil temuan ini tidak sesuai dengan teori *trickle down effect* dimana pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah dari penduduk miskin pada suatu wilayah, dimana akan ada bagian dari pertumbuhan ekonomi yang menetes kebawah dari penduduk kaya kepada penduduk miskin. Sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan semakin memperkecil kesenjangan diantara kelompok kaya dan kelompok miskin. Namun sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat akan semakin memperlebar kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin.

Namun, hasil temuan ini sejalan

dengan Bouincha (2018) dan Sholeh (2012) apabila pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif pada kemiskinan karena peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah hanya akan dinikmati oleh segelintir penduduk kaya atau daerah kaya, yang ekonominya ditunjang oleh sektor industri. Sedangkan sebagian besar penduduk perdesaan yang ekonominya ditunjang oleh sektor pertanian akan semakin miskin, akibat dari masih rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian.

Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2014-2019

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan tidak signifikan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua 2014-2019. Meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan juga akan mengakibatkan kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0.284330 namun pengaruhnya tidak begitu besar.

Hal ini dikarenakan indeks gini di Provinsi Papua tahun 2014-2019 fluktuatif namun cenderung menurun, dimana ketimpangan distribusi pendapatan penduduk berkurang, dari 0,37 tahun 2018 menjadi 0,36 tahun 2019. Penurunan ini diiringi penurunan pada tingkat kemiskinan Propinsi Papua pada tahun 2019 menjadi

27,53% dari tahun 2018 sebesar 27,74%. Dengan demikian ketimpangan distribusi pendapatan memiliki hubungan searah terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Papua. Penurunan ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan semakin meratanya distribusi pada pendapatan penduduk sehingga akan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun pada jumlah penduduk miskin secara agregat di Propinsi Papua tetap mengalami kenaikan dari 917,63 ribu jiwa tahun 2018 menjadi 926,36 ribu jiwa tahun 2019. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini tidak lepas dari penambahan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya. Hal tersebut menandakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan belum mampu mengurangi jumlah total penduduk yang miskin.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nadhifah (2018) dan Abdillah (2016) dimana ketimpangan distribusi pendapatan memiliki pengaruh yang positif pada kemiskinan. Hal ini dikarenakan masih terfokusnya pembangunan hanya di sektor-sektor tertentu sehingga membuat distribusi pendapatan semakin timpang.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2014-2019

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan IPM terhadap tingkat kemiskinan Papua tahun 2014-2019. Dengan setiap ada kenaikan 1%

IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan -0,102161.

Hal ini dikarenakan IPM di provinsi Papua tahun 2014-2019 selalu meningkat. Pada tahun 2018 IPM Provinsi Papua sebesar 60,06 meningkat di tahun 2019 menjadi 60,84. Peningkatan ini diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan yakni pada tahun 2018 sebesar 27,74% menurun menjadi 27,53%. Peningkatan IPM tersebut dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua dan mengindikasikan apabila ternyata IPM mampu meningkatkan pendapatan penduduk melalui peningkatan produktivitas. Dengan demikian dapat tingkat kemiskinan juga ikut menurun. Pembangunan manusia di Provinsi Papua tahun 2014-2019 yang mengalami perbaikan dimana Angka Harapan Hidup (AHH) yang semula 64 tahun menjadi 65 tahun, hal ini menggambarkan perbaikan di bidang kesehatan. Kemudian dibidang pendidikan rerata lamanya sekolah (RLS) dan harapan lamanya sekolah (HLS) juga semakin meningkat, maka hal tersebut menandakan bahwa terdapat kemajuan dalam bidang pendidikan di provinsi Papua hingga dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia ke taraf sedang.

Hal ini sesuai dengan penelitian Kristin (2018) dan Sofilda (2013) dimana IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinn. Tiga indikator IPM indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan

penghidupan yang layak dalam pendapatan perkapita, sangat menentukan tinggi rendahnya kualitas sumberdaya manusianya. Indikator pendidikan berperan penting dalam menyerap teknologi modern. Pendidikan sebagai solusi untuk masyarakat memasuki pasar tenaga kerja dikarenakan banyak tenaga kerja yang mempunyai ketrampilan yang baik lebih banyak dihasilkan dari pendidikan yang tersistem (Hardinandar, 2019:2). Indikator kesehatan juga sebagai syarat dalam peningkatan produktivitas dikarenakan dengan kondisi sehat maka pendidikan akan mudah diperoleh. Sehingga dengan adanya indikator tersebut maka pendapatan penduduk akan mudah diperoleh.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia Secara Bersma-sama Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2014-2019

Berdasarkan pengujian F, didapat F hitung $751.2617 > F\text{-tabel } 3.59$. Sedangkan probabilitas 0.00 kurang dari taraf 0.05 yang berarti ada pengaruh signifikan variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y.

Hal ini mengartikan bahwa variabel independn dalam penelitian ini mempunyai hubungan kuat dengan variabel dependent. Jika terdapat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga terdapat PDRB yang tinggi pula. PDRB yang tinggi tidak terlepas dari

pendapatan penduduk yang semakin meningkat. Peningkatan pendapatan penduduk jika hanya disumbang oleh suatu daerah atau golongan tertentu maka akan terindikasi bahwa terjadi ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Maka dengan tingginya nilai pertumbuhan ekonomi jika pendapatan penduduk tidak terdistribusi secara merata dapat meningkatkan kemiskinan. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi dengan diimbangi pemerataan distribusi pendapatan akan menurunkan kemiskinan. Kemudian pendapatan penduduk tidak terlepas dari pembangunan manusia. Jika pembangunan manusia mengalami perbaikan dengan angka Indeks semakin meningkat maka akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan penduduk. Peningkatan pendapatan penduduk akan menciptakan kesempatan lebih bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Jika pendidikan dan kesehatan penduduk semakin membaik akan mengentaskan penduduk dari kemiskinan. Hasil temuan ini sejalan dengan Wijayanto (2016) dimana tingkat kemiskinan menurun sebagai pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan secara bersama sama.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh positif dan

signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2014-2019.

2. Ada pengaruh positif dan tidak signifikan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2014-2019.
3. Ada pengaruh negatif dan signifikan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2014-2019.
4. Ada pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan dan indeks pembangunan manusia secara bersama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua pada tahun 2014-2019.

SARAN

Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan terdapat saran peneliti yakni:

1. Diharapkan kepada Pemerintah daerah untuk mengintensifkan konsep pro-poor growth dimana pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat dirasakan manfaatnya bagi semua pihak, termasuk penduduk miskin. Dengan menggerakkan sektor unggulan di masing-masing daerah seperti peternakan, pertanian dan konstruksi di

Provinsi Papua dengan harapan pendapatan daerah akan meningkat.

2. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan untuk memperkecil kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin. Dengan mengintensifkan penyaluran dana desa dalam melakukan pembangunan padat karya, tidak menjadikan ketergantungan penduduk desa terhadap dana desa melainkan dapat membuatnya mandiri dalam menciptakan ekonominya.
3. Diharapkan Pemerintah daerah juga meningkatkan pembangunan manusia. Dengan mengadakan pembekalan keterampilan, pelatihan dan kursus akan menjadi spesialisasi khusus bagi masyarakat dalam mencari pekerjaan bahkan membuka lapangan kerja.
4. Diharapkan kepada Pemerintah daerah untuk dapat mengatur kebijakan dalam mengurangi tingkat kemiskinan Provinsi Papua melalui pemerataan pendapatan dengan pemerataan lapangan kerja, perluasan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana publik, serta pemberdayaan dan pembekalan keterampilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Khubbi, dan Djoko. 2016. The Effects of Decentralization, Economic Growth, and Income Inequality on Poverty Rate of Indonesia '33 Provinces. *International Journal of Advanced Research*. Vol. 4, no. 2, hal. 405-414.
- Agustina, Eka dkk. 2013. Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 4, no. 2, hal. 265-283.
- Anzwar, dan Ahmad Subekan. 2016. Analisis Determinan Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. Vol. 2, no. 1, hal. 1-25.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Edisi 5*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Basuki. 2015. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani
- Bouincha, Mohamed, dan Karim. 2018. Income Inequality and Economic Growth: an Analysis Using a Panel Data. *International Journal Of Economic and Finance*. Vol. 15, no. 5, hal. 242-253.
- BPS. 2018. *Pubikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Papua*.
- _____. 2019. *Data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua selama tahun*

- 2014-2019.
- Fahrizal, Sudati, dan Rian. 2019. Analisis Ketimpangan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008- 2017. *DINAMIC:Directory Journal of Economic*. Vol. 1, no. 4, hal. 399-417.
- Hardinandar, Fajrin. 2019. Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua). *Jurnal REP: Riset Ekonomi Pembangunan*. Vol. 4, no. 1, hal. 1-12.
- Kristin, Ari, dan Sulia. 2018. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syari'ah Equilibrium*. Vol. 6, no. 2, hal. 217-240.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Nadhifah, Dhia. 2018. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Brawijaya.
- Nisa, Khoirun, dkk. 2020. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2018. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial SOROT*. Vol. 15, no. 1, hal. 55-63.
- RPJMN. 2015. Rencana Pokok Jangka Menengah Nasional Indonesia.
- Sholeh, Ahmad. 2012. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Review*. Universitas Dehasen Bengkulu. Hal. 197-209.
- Sofilda, Eleonora, et al. 2013. Human Development and Poverty in Papua Province (an Analysis of Simultaneous Approach on Panel Data Regression). *OIDA International Journal of Sustainable Development*. Vol. 6, no. 6, hal. 52-61.
- Sugiyarto, dkk. 2015. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol. 26, no, 2, hal. 115-120.
- Wijayanto, Anton Tri. 2016. Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000-2016. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*. Vol. 16, no. 2, hal. 418-428.